

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang menggunakan kajian pendidikan inklusi sudah dilakukan oleh Taufik Nur Andrian (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014) dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di Kota Yogyakarta tahun 2009 - 2013“. Dalam penelitian tersebut membahas tentang, (1) Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, (2) Fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan (3) Peran kepala sekolah dan pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nur yaitu sama-sama menggunakan kajian pendidikan Inklusi. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian ini mengkaji, (1) Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Pengasih, (2) Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Pengasih, dan (3) Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Pengasih.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Beti Wulandari (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012) dengan judul “Pembelajaran PAI dan Problematikanya Bagi Siswa Tunarungu Jenjang SDLB Kelas III di SLB Negeri 1 Gunungkidul”. Dalam penelitian Beti, membahas, (1) Pelaksanaan pembelajaran PAI bagi siswa tunarungu jenjang SDLB, (2) Problematika yang dihadapi oleh pendidik dalam pembelajaran PAI bagi siswa tunarungu jenjang SDLB, dan (3) Solusi pendidik dalam menghadapi problematika pembelajaran PAI bagi siswa tunarungu jenjang SDLB.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Beti yaitu persamaan penelitian Beti dengan penelitian ini terletak pada sama-sama menggunakan subjek penelitian yaitu peserta didik berkebutuhan khusus, namun jenis kesulitan/ hambatannya yang berbeda. Perbedaan juga terletak pada kajiannya, penelitian ini menggunakan kajian pendidikan inklusi dan penelitian Beti mengkaji pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Fokus penelitian Beti terletak pada permasalahan dan solusi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam hal pemberian materi ajar.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ela Rahayuningsih (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) dengan judul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa Autis di SD Purba Adhika Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi”. Dalam penelitian Ela, membahas, (1) Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa autis, (2) Pelaksanaan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa autis, dan (3) Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa autis.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ela yaitu persamaan penelitian Ela dengan penelitian ini terletak pada sama-sama menggunakan subjek penelitian yaitu peserta didik berkebutuhan khusus, namun jenisnya hambatan belajar/ kelainannya berbeda. Perbedaannya terletak pada kajian, penelitian ini menggunakan kajian pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pendidikan Inklusi dan penelitian Ela mengkaji pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Fokus penelitian Ela terletak pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Jurnal penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusi di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu” dilakukan oleh Prita Indriawati. Penelitian ini fokus dalam implementasi kebijakan khusus supervisi tugas guru berdasarkan kebijakan hibah Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 junto Pergub Jatim Nomor 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1. Penelitian ini bertujuan: (1) menggambarkan tugas guru pembimbing khusus dalam proses identifikasi, layanan penilaian dalam menyusun program pengajaran individual pendidikan Inklusi di depan umum SD Junrejo Batu, (2) menggambarkan pelaksanaan tugas Khusus Guru Pembimbing pada merancang dan memberikan program yang spesifikitas pada pendidikan Inklusi di depan umum SD Junrejo Batu, dan (3) menggambarkan

pelaksanaan tugas khusus Guru Pembimbing dalam memodifikasi pengajaran pendidikan Inklusi di depan umum SD Junrejo Batu.

Jurnal penelitian yang kedua dilakukan oleh Syafrida Elisa dengan judul “Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk sikap guru terhadap pendidikan Inklusi ditinjau dari faktor pembentuknya dan mengetahui faktor-faktor pembentuk apa yang mempengaruhi sikap guru terhadap pendidikan Inklusi. Penelitian dilakukan pada empat orang subjek yang mengajar di sebuah sekolah Inklusi di Surabaya. Informasi mengenai sikap subjek diungkap melalui metode wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan melakukan koding terhadap hasil transkrip wawancara dan catatan lapangan yang kemudian di analisis.

Jurnal penelitian ketiga dengan judul “Evaluasi Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Gejayan Kabupaten Sleman Yogyakarta” dilakukan oleh Maria j. Wantah. Dalam penelitian tersebut membahas tentang, (1) relevansi pelaksanaan program Inklusi dengan kebutuhan ABK, (2) karakteristik ABK yang berkebutuhan khusus, kebutuhan belajar, guru, penyelenggara, dan ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan program Inklusi, (3) interaksi antara guru kelas dan guru pembimbing khusus dengan ABK dalam proses belajar mengajar, (4) pemanfaatan penyelenggaraan program Inklusi bagi ABK.

Jurnal penelitian yang berjudul “Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh” dilakukan oleh Ery Wati. Program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar SD Negeri 32 Kota Banda Aceh akan berhasil apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional di dalam melaksanakan operasional sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pendidikan inklusi, implementasi manajemen pendidikan inklusi dan kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh.

Jurnal penelitian oleh Husniyatus salamah Zainiyati berjudul “Pendidikan Multikultural Upaya Membangun Keberagaman Inklusi di Sekolah”. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural merupakan keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, masyarakat, jenis kelamin, intelektual ketajaman dan usia sebenarnya bisa digunakan untuk membuat pluralisme inklusi melalui memadai strategi dan konsep efisien pendidikan. Secara praktis, apa yang dibutuhkan dari guru di seluruh konsep pendidikan ini tidak hanya untuk dapat mengajarkan subjeknya materi, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dan Inklusi seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Pada akhirnya, apa pendekatan ini dapat mencapai adalah untuk menghasilkan *out-put* yang memiliki tidak hanya keterampilan akademik dispesialisasinya, tetapi juga kemampuan untuk mengadopsi dan menerapkan norma-norma pluralisme yang akan menyebabkan menjadi lebih toleran dan memahami terhadap keragaman dan perbedaan.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan kelima jurnal penelitian yang telah ditinjau yaitu sama-sama menggunakan kajian pendidikan Inklusi. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian ini mengkaji, (1) Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Pengasih, (2) Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Pengasih, dan (3) Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Pengasih.

B. Kerangka Teori

1. Problematika Pembelajaran

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Adapun masalah itu sendiri “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”.

Kata pembelajaran dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata ajar artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut), dan mendapat imbuhan pe-an sehingga artinya menjadi cara atau proses menjadikan orang belajar. Adapun dalam bahasa Arab disebut dengan ta'lim yang berarti mengajar, dan dalam bahasa Inggris disebut

dengan to teach atau to instruct artinya to direct to do something, to teach to do something, yakni memberi pengarahan agar melakukan sesuatu,⁸ dan mengajar akan melakukan sesuatu.

Menurut istilah, pembelajaran diartikan oleh beberapa pakar sebagai berikut; Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi mengartikan pembelajaran sebagai suatu aktivitas (proses belajar mengajar) yang sistematis dan sistemik yang terdiri dari berbagai komponen, antara satu komponen pengajaran dengan lainnya saling tergantung dan sifatnya tidak parsial, komplementer dan berkesinambungan.

Dari pengertian tentang “Problematika dan Pembelajaran” yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal.

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Departemen Agama (2004) sebagaimana dikutip Nazarudin (2007: 12) Pendidikan Agama Islam merupakan “usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan”. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan “proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Islam dari peserta didik, yang

di samping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk sosial” (Muhaimin, 2010: 76).

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen utama yang saling berpengaruh dalam proses pembelajaran pendidikan agama. Ketiga komponen tersebut adalah (1) kondisi pembelajaran pendidikan agama, (2) metode pembelajaran pendidikan agama, dan (3) hasil pembelajaran pendidikan agama (Muhaimin, 2010: 76). Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat.

a. Materi Pembelajaran

Pengertian seluruh perencanaan itu jika dikaitkan dengan konsep yang berkembang dewasa ini meliputi Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan pembelajaran, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka/awal, kegiatan inti dan penutupnya, serta media pembelajaran, sumber pembelajaran yang terkait, sampai dengan penilaian pembelajaran. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut: Al-qur'an dan hadist, aqidah, akhlak, fiqh, dan tarikh dan kebudayaan Islam. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan

pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian (Nazaruddin, 2007: 109).

Materi memang haruslah didesain dengan baik agar bisa sesuai dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsinya adalah:

- 1) Untuk memperluas dan menambah pengetahuan peserta didik
- 2) Sebagai dasar pengetahuan bagi siswa untuk pembelajaran
- 3) Menjadi bahan yang digunakan dalam pembelajaran

b. Metode Pembelajaran

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Peran semua unsur sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam. Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran dapat dianggap sebagai sesuatu prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan pembelajaran (Suyono dan Hariyanto, 2012: 19).

c. Evaluasi Hasil Pembelajaran

Menurut Wandt dan Brown (1997) sebagaimana dikutip Mulyadi (2010: 1) penilaian adalah *'refer to the act or process determining the value of something'* (penilaian adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu). Dalam setiap proses belajar akan selalu

terkandung di dalamnya unsur penilaian (*evaluation*). Penilaian merupakan bagian yang terpenting dari proses belajar mengajar, sebab penilaian itu akan dapat membantu menjawab masalah-masalah penting, baik yang berkaitan dengan peserta didiknya maupun yang berkaitan dengan prosedur mengajarnya. Pembelajaran *setting* inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa (metode, media, dan sumber belajar) (Muhaimin, 2010: 145).

Evaluasi pembelajaran adalah tindakan untuk menentukan nilai atas suatu hal (dalam konteks hasil pembelajaran). Untuk fungsinya sendiri adalah:

- 1) Memberikan laporan hasil belajar kepada orang tua siswa
- 2) Mengetahui keefektifan suatu metode belajar
- 3) Untuk mengetahui kemampuan peserta didik

3. Pendidikan Inklusi

a. Pengertian Pendidikan Inklusi

Banyak di antara orangtua yang memiliki anak “berbeda” merasa malu, kecewa, putus asa dan pasrah tidak melakukan apa pun yang terbaik untuk anaknya. Mengapa semua mata orang tertutup hanya karena sebuah ketidaksempurnaan. Anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang berbahaya atau anak yang harus disingkirkan agar keluarga tidak malu karena keberadaannya. Mereka sama seperti anak lainnya,

butuh kasih sayang, butuh perhatian, dan tentunya butuh belaian lembut dari orang tuanya.

Menurut para ahli, anak berkebutuhan khusus memiliki bakat tinggi dibandingkan dengan anak yang normal. Anak berkebutuhan khusus adalah “anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya.” (Smart, 2011: 33). Pada tahun 1986 suatu seruan untuk menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam program-program pendidikan reguler dikeluarkan oleh *Assistant Secretary for special Education and Rehabilitative Service of the US Department of Education*. Sekretaris Madeline Will mengajukan apa yang dia sebut *Reguler Edication Initiative (REI)*. Para pendukung REI bertahan, bahwa hanya dengan penyatuan pendidikan khusus ke dalam struktur pendidikan reguler semua anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang mereka butuhkan tanpa stigma yang dihubungkan dengan pendidikan khusus (Smith, 2013: 43-44).

Berdasarkan adanya permasalahan mengenai beragamnya kemampuan dan karakteristik manusia, pemerintah menyupayakan untuk memberi kesempatan agar semua warga negara yang mempunyai tingkat perkembangan baik fisik maupun mental atau perkembangan jasmani dan rohani yang berbeda dan beragam mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pengajaran yang sama dan bermutu untuk mencapai kedewasaan (Kustawan dan Meimulyani, 2013: 1).

Pembelajaran inklusi yaitu usaha-usaha dalam pendidikan yang memfasilitasi seluruh peserta didik, baik dengan kemampuan normal maupun berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kompetensi akademiknya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki berdasar pada karakteristik masing-masing peserta didik dalam satu kelas pada proses kegiatan belajar mengajar.

Pendidikan inklusi merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berpartisipasi. Definisi pendidikan Inklusi yang dirumuskan dalam seminar Agra disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara (terutama dari “Selatan”) pada tahun 1998. Definisi ini kemudian diadopsi dalam *South African White Paper on Inclusive Education* dengan hampir tidak mengalami perubahan (Stubbs, 2002: 38).

Stubbs (2002: 123) mengemukakan satu paragraf dalam pasal 2 Pernyataan Salamanca yang memberikan argumen sangat indah untuk sekolah inklusi:

Sekolah reguler dengan orientasi inklusi merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap deskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusi dan mencapai pendidikan untuk semua; lebih dari itu, sekolah inklusi memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan.

Dengan adanya permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi siswa yang memiliki kelainan pada potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pembelajaran *setting* inklusi

mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa (metode, media dan sumber belajar).

Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/ atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal dengan mempertimbangkan kesulitan peserta didik sehingga memerlukan pendidikan layanan khusus dan penyesuaian-penyesuaian yang seharusnya dilakukan dalam upaya memberikan akses (Kustawan dan Meimulyani, 2013: 99-100).

b. Landasan Pendidikan Inklusi

Landasan pendidikan inklusi atas dasar hukum pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan implementasinya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- 4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penandang Disabilitas)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- 9) Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 380/c.c6/MN/2003 tentang pendidikan Inklusi
- 10) Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
- 11) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

c. Tujuan Pendidikan Inklusi

Ilahi (2013) sebagaimana dikutip Rahayuningsih (2015: 29-31) tujuan diadakannya pendidikan inklusi adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

d. Karakteristik Sekolah Inklusi

Budiyanto (2005) sebagaimana dikutip Rahayuingsih 2015: 28-19) menyatakan bahwa karakteristik terpenting dari sekolah pendidikan inklusi adalah suatu komunitas yang kohensif. Untuk itu Sapon Shevin lebih lanjut dikemukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusi.

- 1) Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Pendidik mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua peserta didik secara penuh dengan menekan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial-ekonomi, suku, agama, dan sebagainya.
- 2) Pendidikan inklusi berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Mengajar kelas yang memang dibuat heterogen memerlukan perubahan kurikulum mendasar. Pendidik di kelas inklusi secara konsisten akan bergeser dan pembelajaran yang kaku, berdasarkan buku teks, atau materi asal ke pembelajaran yang

banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, berfikir kritis, pemecahan masalah, dan asesmen secara autentik.

- 3) Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong pendidik untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan secara metode pembelajaran. Model kelas tradisional dimana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik di kelas harus diganti dengan model para peserta didik bekerjasama, saling mengajar, dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan teman-temannya. Kaitan antara pembelajaran kooperatif dan kelas inklusi sekarang jelas; semua peserta didik berada di satu kelas bukan untuk kompetisi, tetapi untuk saling belajar dari yang lain.
- 4) Pendidikan inklusi berarti menyediakan dorongan bagi pendidik dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Meskipun pendidik selalu dikelilingi oleh orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusi meliputi pengajaran dengan tim, kolaborasi dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok peserta didik, kerjasama tim antara pendidik dengan profesi lain diperlukan, seperti para profesional, ahli bina bahasa dan wicara, petugas bimbingan, dan sebagainya. Meskipun untuk dapat bekerjasama dengan orang lain secara baik

memerlukan pelatihan dan dorongan, kerjasama yang diinginkan ternyata dapat terwujud.

- 5) Pendidikan inklusi berarti melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses perencanaan. Pendidikan inklusi sangat tergantung kepada masukan orangtua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan program pengajaran individual.

e. Kurikulum Sekolah Pendidikan Inklusi

Menurut Rahayuningsih (2015: 29-31) dalam penyusunan perencanaan pembelajaran *setting* inklusi, yaitu:

- 1) Identifikasi

Setiap pendidik harus mengetahui latar belakang dan kebutuhan masing-masing peserta didik agar dapat memberikan pelayanan dan bantuannya dengan tepat. Setiap guru harus memiliki kemampuan mengidentifikasi peserta didik atau calon peserta didik untuk mengetahui kondisi semua peserta didik.

Menurut Kustawan (2012) sebagaimana dikutip Rahayuningsih (2015: 30) adalah sebagai berikut.

Identifikasi merupakan suatu kegiatan atau upaya yang digunakan untuk menemukan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kelainannya atau sesuai dengan hambatan/gangguan. Tujuannya yaitu untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus supaya perkembangan yang dicapai sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Cara mengidentifikasi dapat dilakukan oleh guru masing-masing anak bersama-sama dengan guru yang lain. Caranya yaitu: 1) melalui pengamatan (observasi) yaitu pengamatan partisipatif atau non partisipatif,

2) wawancara pada anak yang bersangkutan, pendampingnya, dan orangtuanya, dan 3) melalui dokumentasi, yakni dokumen yang berupa dokumen hasil pemeriksaan psikologi (jika ada), surat keterangan dokter, psikiater atau ahli lainnya.

2) Asesmen

Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program bagi peserta didik tersebut. Melalui asesmen dapat diketahui kemampuan apa yang dimiliki, apa yang belum atau kelemahannya, dan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, sehingga dapat dirancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan utama asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

3) Pengembangan Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah kurikulum reguler, kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasikan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara memodifikasi waktu atau isi/materi.

Komponen pengembangan kurikulum di sekolah inklusi yang perlu diperhatikan meliputi:

a) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar,

- b) Penyusunan silabus,
 - c) Menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran. Bagi sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), maka penyusunan silabus yang di antaranya memuat langkah-langkah pembelajaran dan indikator pencapaian harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan karakteristik dan potensi siswa.
- 4) Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik, efektivitas proses pembelajaran, dan umpan balik. Selain itu, hasil penilaian juga digunakan oleh pendidik untuk menilai kompetensi peserta didik bahan penyusunan pelaporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Teknik penilaian yang dapat digunakan oleh pendidik di dalam penyelenggaraan inklusi adalah dengan tes tertulis, observasi, tes kinerja, penugasan, tes lisan, penilaian portofolio, jurnal, inventori, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebelum memulai pembelajaran dilakukan asesmen. Asesmen tersebut untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan standar awal peserta didik, sehingga selanjutnya disusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.